

**PENGARUH PENGAWASAN DPRD, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PERAN
AUDITOR INTERNAL TERHADAP GOOD GOVERNANCE
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Solok)**



Oleh:
HABIBIE
2009/94085

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode Maret 2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

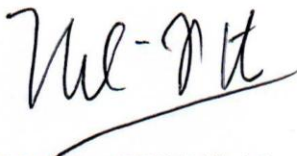
**PENGARUH PENGAWASAN DPRD, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PERAN
AUDITOR INTERNAL TERHADAP GOOD GOVERNANCE
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Solok)**

HABIBIE
2009/94085

**Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Maret 2013
dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.**

Padang, Maret 2013

Pembimbing I



Nelvirita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19740706 199903 2 002

Pembimbing II



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

**PENGARUH PENGAWASAN DPRD, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PERAN
AUDITOR INTERNAL TERHADAP GOOD GOVERNANCE
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Solok)**

Habibie

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang
Email: habibie.elang@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence: (1) To provide empirical evidence that influenced the parliament oversight of good governance. (2) In order to provide empirical evidence that internal controls will affect the creation of good governance. (3) In order to provide empirical evidence that the role of auditors affecting good governance. This study considered the causative research. The study population was Unit (SKPD) Solok City. The selection of samples with total sampling technique. Data processing technique used is multiple regression. The results of this study show that: (1) Oversight Council have a significant positive impact on good governance. (2) Internal controls have a significant positive impact on good governance. (3) The role of the internal auditor does not have a significant and negative impact on good governance.

Keywords: *Monitoring Council, internal control, internal audit role, good governance*

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang: (1) Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengawasan DPRD mempengaruhi terciptanya *good governance*. (2) Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengendalian internal akan mempengaruhi terciptanya *good governance*. (3) Untuk memberikan bukti empiris bahwa peran auditor mempengaruhi *good governance*. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Solok. Pemilihan sampel dengan teknik *total sampling*. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengawasan DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap *good governance*. (2) Pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap *good governance*. (3) Peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *good governance*.

Kata kunci : *Pengawasan DPRD, Pengendalian internal, Peran auditor internal, good governance*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan hubungan pemerintah dan masyarakat sejak terjadinya reformasi besar-besaran baik dibidang kelembangaan pemerintah, ekonomi, dan politik. Maka munculnya konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang menuntut transparansi pengelolaan keuangan rakyat sehingga terciptanya akuntabilitas publik. Tuntutan ini memang wajar, karena mengingat sebelum reformasi tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan rakyat. Hal itu terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan, pengendalian, dan kontrol pejabat-pejabat yang terkait, baik dari pihak internal maupun eksternal yang tidak saling sinergi dalam mengawasi kinerja pemerintahan pusat maupun daerah.

Tajuddin dalam Wahyudi (2009) menyatakan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain faktor pelaksanaan yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD, dan pegawai daerah itu sendiri, faktor partisipasi masyarakat, faktor keuangan daerah, serta faktor organisasi dan manajemen. Sementara itu menurut Mardiasmo (2004:205) menyatakan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan yaitu, pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga unsur tersebut tentunya memiliki fungsi dan aplikasinya yang berbeda pula.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan (Mardiasmo, 2004 :213). Tanpa adanya pengawasan dari DPRD maka *good governance* tidak akan terwujud, jadi dalam arti kata pengawasan DPRD berpengaruh terhadap terciptanya *good governance*. Karena mulai dari produk hukum, pelaksanaan, dan keuangan diawasi oleh DPRD. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD dalam

melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.

Pengendalian intern adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (Pemerintah). Dengan adanya pengendalian intern yang efektif maka tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan dilakukan dengan andal, pengamanan aset dapat dilakukan dan mendorong ketaatan kepada peraturan (Mardiasmo, 2004: 208).

Di samping itu, pelaksanaan pengendalian intern harus diuji efektifitasnya. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang, dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu secara efektif (A.Arens, 2008). Salah satu hambatan dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia adalah tidak adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal menyebabkan lemahnya pengendalian internal (Mardiasmo, 2004 :42). Jadi bisa dikatakan jika ada sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal maka pengendalian internal berjalan secara efektif dan efisien maka akan tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki *independensi* dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Mardiasmo, 2004 :205). Salah satu unit yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah/Auditor. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga

dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Auditor internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi.

Auditor pemerintahan merupakan salah satu elemen penting lainnya yang mempengaruhi terciptanya *good governance* dan ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2004 :218), yang menyatakan *good governance* akan tercapai jika lembaga pengawasan dan pemeriksa berfungsi secara baik. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2004 :216) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, peranan auditor masih menjadi perdebatan.

Dari tiga unsur di atas (Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal, dan Peranan Auditor Intern) jika saling bersinergi dan melaksanakan peranannya masing-masing maka akan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyudi (2009) menguji pengaruh sistem pengendalian internal dan auditor intern terhadap pelaksanaan *good governance*. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*. Sementara itu hasil penelitian dari Rozalina (2010) menguji pengaruh pengawasan dari DPRD, dan Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Indonesia saat ini. Pemerintahan yang diidamkan oleh

semua lapisan masyarakat, dan untuk melaksanakan pemerintahan yang baik itu ada beberapa karakteristik. Menurut Mardiasmo, (2004: 23) Jika mengacu pada program *World Bank* dan *UNDP* (United National Development principle), orientasi pembangunan sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*. Lebih jauh, UNDP menyatakan 9 karakteristik *good governance* sebagai berikut: (1) *Participation*, (2) *Rule of law*, (3) *Transparency*, (4) *Responsiveness*, (5) *Consensus orientation*, (6) *Equity*, (7) *Efficiency and effectiveness*, (8) *Accountability*, dan (9) *Strategic vision*.

Dilakukannya penelitian ini juga di karenakan ketiga komponen diatas sangat berpengaruh sekali terhadap pembentukan *good governance* terutama di Kota Solok, karena berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat No.23/S/XVIII.PDG/01/2010 Tahun Anggaran 2008 dan 2009, banyak sekali temuan-temuan maupun kejangalan yang menyimpang dari ketentuan peraturan pemerintah pusat baik dari segi organisasi, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan yang tidak mengindikasikan pemerintahan yang baik, salah satu penyimpangan tersebut dalam laporan BPK perwakilan Sumatera Barat adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa. Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain beberapa pengadaan barang/jasa diatas Rp100.000.000,00 yang seharusnya dilakukan dengan metode pelelangan umum masih dilakukan dengan metode penunjukan langsung maupun pemilihan langsung, terdapat beberapa penyelesaian pekerjaan yang terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan, kemahalan harga, pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum didalam kontrak, masa berlaku jaminan pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan, dan kekurangan pekerjaan fisik.

Selain dari hasil laporan BPK diatas juga terdapat lemahnya pengawasan DPRD Kota Solok dalam hal pelaksanaan pembangunan karena banyak sekali proyek-proyek pembangunan terutama untuk kepentingan masyarakat banyak dikerjakan asal jadi. Baru beberapa saat digunakan, bangunannya sudah mengalami kerusakan. (<http://www.padangmedia.com>)

Berdasarkan temuan-temuan BPK serta permasalahan diatas yang terjadi di Kota Solok pada tahun anggaran 2008 dan 2009 tidak mencerminkan *good governance*. Maka penulis mencoba untuk memperoleh data yang akurat guna mengetahui pengaruh dari ketiga komponen tersebut terhadap *good governance*. penulis memberi judul penelitian ini dengan “pengaruh pengawasan DPRD, pengendalian internal, dan peran auditor internal terhadap *good governance* pada kota solok”.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Good Governance

Dalam Mardiasmo (2002:17) *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program* (UNDP) memberikan pengertian *good governance* sebagai berikut “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

1. Karakteristik Good Governance

UNDP dalam Mardiasmo (2004: 24) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi.

1. Partisipasi (*Participation*), Setiap orang atau setiap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing partisipasi yang luas ini perlu di bangun dalam suatu tatanan kebebasan berasosiasi dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif. Termasuk memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.
2. Aturan Hukum (*Rule of law*), Kerangka hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh (*Impartially*), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan pemerintahan yang baik membutuhkan kerangka hukum yang fair dan penegakan hukum dalam pelaksanaan tanpa terkecuali, serta adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibutuhkan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia secara mutlak, terutama untuk kelompok minoritas penegak hukum secara mutlak membutuhkan pengadilan yang independen dan pihak kepolisian yang tidak korupsi.
3. Transparansi (*Transparency*), Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi baru harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.
4. Daya tanggap (*Responsiveness*), Setiap melaksanakan pemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan

- pemerintah harus melayani semua stakeholdersnya secara tepat, baik dalam waktu yang cepat (tanggap terhadap kemauan masyarakat).
5. Berorientasi Konsensus (Consensus orientation), Dalam hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat di berlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
 6. Berkeadilan (Equity), Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama, baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
 7. Efisiensi dan Efektif (Efficiency and effectiveness), Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dari berbagai sumber daya yang tersedia. Jika ini berjalan sebagaimana yang diharapkan maka berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, biaya operasional, meningkatkan pelayanan publik, dan berprospek memperoleh standar ISO pelayanan.
 8. Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan. Dan jika melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan maka adanya sanksi yang ditetapkan. Jika ini berjalan yang diharapkan maka adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan berdampak berkurangnya kasus-kasus KKN.
 9. Visi Strategi (Strategic vision), Dalam penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan dan dapat dilakukan melalui :

- a. Adanya visi dan strategis yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai.
- b. adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi.
- c. adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran.
- d. adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan.

Pengawasan DPRD Terhadap *Good Governance*

Victor (1993) memberikan definisi tentang pengawasan yaitu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, definisi pengawasan yaitu suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan terlaksana, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pekerjaan itu sesuai dengan rencana semula.

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Abdullah, 2005 :105). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi).

Pengawasan dari DPRD

1. Pengawasan dalam proses penyusunan.
2. Pengawasan dalam pengesahan (ratifikasi) APBD.
3. Pengawasan dalam pelaksanaan (Implementation) APBD.
4. Pengawasan dalam laporan pertanggungjawaban APBD.

Pengendalian Internal

Pengendalian Internal (control) adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan aktivitas sebuah obyek, organisasi, atau sistem (Krisniaji, 2002:215). Akuntan sering mempergunakan istilah Pengendalian Internal (Internal Control) sebagai salah satu sinonim untuk pengendalian di dalam organisasi perusahaan. Suatu sejarah singkat konsepsi pengendalian di dalam organisasi perusahaan. Suatu sejarah singkat konsepsi pengendalian internal perlu di perhatikan. istilah pertama kali di definisikan pada tahun 1949 oleh suatu Komite Institute Akuntan Amerika (sekarang namanya American Institute of certified accountant atau AICPA) sebagai berikut :

Pengendalian internal (Internal Control) meliputi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinir dan tindakan/ukuran yang ditetapkan di dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta (kekayaan)-nya, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasi dan mendorong ketaatan kepada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh manajemen. Sistem pengendalian internal yang handal dapat mencegah timbulnya kerugian karena penggunaan sumber daya yang boros, Keputusan manajemen yang tidak akurat dan sebagainya.

Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko. penilaian resiko sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Identifikasi resiko.
2. Analisa resiko.

Dalam rangka penilaian resiko pimpinan instansi pemerintah menetapkan:

1. Tujuan Instansi Pemerintah
2. Tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
2. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko.
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan secara tertulis.
6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan Pengendalian tersebut terdiri atas :

1. Review atas kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan.
2. Pembinaan sumber daya manusia.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem Informasi.
4. Pengendalian fisik atas aset.
5. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja.
6. Peminsahan fungsi.
7. Otorisasi dan transaksi atas kejadian yang penting.
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.

9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

Dokumen yang baik atas sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian yang terpenting.

Peran Auditor Internal

Audit internal menurut Sawyer (2005:10) adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi, untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

Peran Auditor Internal

Menurut peraturan pemerintah No.79 Tahun 2005 Inspektorat daerah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
2. Pemeriksa berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
3. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit atau satuan kerja.
4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, dan nepotisme.
5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan Pemerintahan desa.

Penelitian Relevan

Devfi (2008) mengadakan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Objek penelitian adalah seluruh kantor Cab. Bank Pemerintah dan Swasta di Kota Padang. Peneliti menjadikan semua populasi sebagai sampel (total sampling).

Wahyudi (2009) mengadakan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal, peran auditor internal, dan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari penelitian tersebut di peroleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*, peran auditor internal berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*, dan pengawasan dari masyarakat mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota padang yang berjumlah 48 instansi. Untuk sampelnya, digunakan teknik pemilihan sampel berdasarkan strata (proposional sampling).

Rozalina (2010) mengadakan penelitian tentang pengaruh pengawasan DPRD, pengendalian internal, dan pemeriksaan eksternal terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari penelitian tersebut di peroleh hasil bahwa pengawasan DPRD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*, pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*,

dan pemeriksaan eksternal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota padang yang berjumlah 42 SKPD. Untuk sampelnya, digunakan teknik pemilihan sampel total sampling.

Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Pengawasan DPRD dengan *Good Governance*

Sebagaimana disepakati dalam seminar ICW dikutip dalam Yudoyono (2003:14) bahwa pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD (Mardiasmo:2002) salah satu fungsi pokok DPRD adalah di Indonesia adalah melakukan pengawasan.

Pengawasan DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahapan perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka akan sangat mungkin pada saat pelaksanaan akan banyak mengalami penyimpangan (Wahyudi : 2009). Jika dalam pelaksanaan anggaran terjadi banyak penyimpangan maka tujuan organisasi pemerintahan akan sulit untuk dicapai dengan kata lain *good governance* tidak akan terlaksana.

b. Hubungan Pengendalian Internal dengan *Good Governance*

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan

manajemen (Mulyadi : 2001,165). Salah satu cita-cita reformasi total di Indonesia adalah menciptakan pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *good governance*. Harus diakui bahwa saat ini *good governance* masih belum terlaksana oleh bangsa Indonesia.

Jika dilihat dari sudut pandang akuntansi sektor publik terdapat permasalahan utama yang menyebabkan *good governance* tidak dapat terlaksana yaitu lemahnya pengendalian internal pemda. Hal ini dialami oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Jika pengendalian internal tidak memadai maka sudah tentu pemerintahan yang baik tidak akan terwujud mungkin hanya tinggal cita-cita belaka (Rozalina : 2010).

c. Hubungan Peran Auditor Internal dengan *Good Governance*

Auditor Internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksaan yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Yang termasuk auditor internal adalah audit yang dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen, Sistem Pengawasan Internal (SPI) dilikungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilko), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Good governance* akan terlaksana jika peran auditor internal berfungsi secara baik. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran auditor internal berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *good governance* pada instansi pemerintah. Dan ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyudi (2009) di Kota Padang.

Kerangka Konseptual

Ada beberapa unsur yang mempengaruhi *good governance* tidak terlepas dari (Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal) jika tiga unsur ini saling bersinergi maka akan terciptalah pemerintahan yang baik, yang jauh dari unsur KKN dan lebih memperhatikan kemakmuran masyarakat yang dipimpinya.

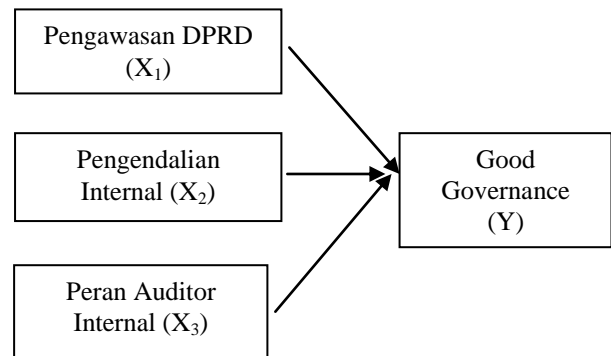
Pengawasan DPRD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, dimulai dari penyusunan APBD hingga pelaporan pertanggung-jawaban dan harus diawasi oleh DPRD untuk menghindari penyelewengan atau penyimpangan yang bisa merugikan masyarakat banyak. Jika dalam pelaksanaan anggaran terjadi banyak penyimpangan maka tujuan organisasi tidak akan tercapai dan mustahil *good governance* terlaksana.

Begitu juga pengendalian internal yang berperan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif baik dari segi pelaporan keuangan yang andal maupun pengamanan aset dan dapat mendorong ketaatan kepada peraturan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Peran auditor internal tidak kalah pentingnya dalam terciptanya *good governance* yang banyak diimpikan oleh masyarakat banyak. Auditor internal mempunyai peranan sebagai pengontrol dalam operasi organisasi pemerintahan. Dengan arti kata pengendalian internal merupakan memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai suatu instansi Pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat, dan untuk mencapai itu tentunya diperlukan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan tercipta dengan pengawasan, pengendalian, dan kontrol yang baik pula. Berdasarkan uraian

diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Dari uraian teori dan latar belakang sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

- H₁ : Pengawasan DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap *Good Governance* pada SKPD Kota Solok.
- H₂ : Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap *Good Governance* pada SKPD Kota Solok..
- H₃ : Peran Auditor Internal berpengaruh signifikan positif terhadap *Good Governance* pada SKPD Kota Solok.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini merupakan penelitian kausatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh secara langsung dari Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan pada masing-masing SKPD Kota Solok dengan menggunakan daftar pernyataan dalam bentuk kuisisioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), Pemerintah Kota Solok memiliki Satuan

Kerja Perangkat Daerah sebanyak 25 SKPD yang terdiri dari Sekretaris, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Inspektorat.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan bagian pada masing-masing SKPD. Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden yang ada pada saat penelitian dilakukan. Pengembalian kuesioner diambil langsung dari responden setelah selesai menjawab item-item pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan.

Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah penelitian. Pengamatan akan dapat mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penerapan *good governance* (Y)

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif ataupun negative bagi variabel dependen lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengawasan dari DPRD (X_1), Pengendalian Intern (X_2), Peran Auditor Internal (X_3),

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Variabel diukur menggunakan skala likert 5 alternatif, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan pendapat setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 Sangat Setuju (SS), 4 Setuju (S), 3 Ragu-Ragu (RR), 2 Tidak Setuju (TS), 1 Sangat Tidak Setuju (STS). Pengisian kuisisioner dilakukan oleh Kepala

Dinas dan Kepala Bagian Keuangan pada masing-masing SKPD Kota Solok. Setelah data terkumpul lalu dilakukan uji instrumen untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan merupakan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya. Untuk itu digunakan dua macam pengujian, yaitu uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah untuk mengukur sejauh mana instrument yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dari print out SPSS dapat dilihat dari *corrected item total correlation*. Jika nilai r hitung kecil dari r table, maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilai r hitung besar dari r table maka item tersebut dinyatakan valid, maka item yang memiliki nilai r hitung yang paling kecil dikeluarkan dari analisis, kemudian dilakukan analisis yang sama sampai semua item dinyatakan valid.

2. Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha* dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 17, jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 maka instrumen dikatakan reliabel.

Sekaran (2006) menyatakan cara mengukur reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0,6 tidak reliabel
- b. 0,6 -0,7 akseptabel
- c. 0,7 - 0,8 baik
- d. Lebih dari 0,8 reliabel

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi pada penelitian ini agar parameter estimasi tidak bias, yaitu:

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas residual dapat digunakan untuk menguji apakah data kontinue berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas, regresi, reabilitas, uji-t, korelasi dapat dilaksanakan. Data yang baik adalah yang mempunyai pola seperti distribusi normal (tidak mencong ke kiri atau ke kanan). Uji normalitas residual dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. jika nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) < 10 dan *tolerance* $> 0,10$

3) Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji glejser dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Analisis Deskriptif

Mempelajari tata cara penghitungan, penyusunan, penyajian, dan analisis data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari sebuah data. Untuk melakukan analisis deskriptif dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Verifikasi Data

Yaitu memeriksa kembali kuisioner yang telah diisi oleh responden, untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

1) Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pernyataan yang diajukan.

2) Menghitung rata-rata skor total item dengan rumus :

$$\frac{5SS + 4S + 3KS + 2TS + STS}{5}$$

Keterangan :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS= Sangat Tidak setuju

c. Untuk mengetahui masing-masing kategori jawaban dari deskripsi variabel maka digunakan rumus ;

$$TCR = \frac{Rs}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

TCR = Tingkat Pencapaian Responden

Rs = Rata-rata skor jawaban responden

n = Nilai skor jawaba

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut :

a. Interval jawaban responden 76 – 100% kategori jawabannya baik.

- b. Interval jawaban responden 56 – 75% kategori jawabannya cukup baik.
- c. Interval jawaban responden < 56% kategori jawabannya kurang baik.

2. Metode Analisis

a. Koefisien Determinan (R Square)

Koefisien determinan pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas, maka untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat terhadap digunakan Adjusted R². Nilai adjusted R². Nilai adjusted R² dapat di peroleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Adjusted } R^2 = 1 - (1 - R^2) \left(\frac{N-1}{N-K} \right)$$

Keterangan :

- R² = Koefisien determinasi
- n = Jumlah Sampel
- K = Jumlah variabel bebas

b. Model Estimasi

Analisis data menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

- a = Konstanta
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi dari masing-masing variabel
- X₁ = Pengawasan DPRD
- X₂ = Pengendalian Internal
- X₃ = Peran Auditor Internal
- Y = *Good Governance*

e = Epsilon (variabel-variabel independen lainnya yang diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen).

c. Uji F

Digunakan untuk mengetahui apakah suatu model dapat memprediksi dengan baik atau tidak, dengan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 - (k)}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Dimana :

R² = koefisien determinan

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel bebas

jika F_{hitung} > F_{tabel} atau sig < 0,05 maka Ha diterima dan H₀ ditolak. Jika F_{hitung} < F_{tabel} atau sig > 0,05 maka Ha ditolak dan H₀ diterima. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis 95% atau (α) = 0,05

d. Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk melihat nilai signifikan masing-masing parameter yang diestimasi, maka digunakan t-test dengan rumus ;

$$t - Test = \frac{\beta n}{S\beta n}$$

Keterangan :

- t = Nilai mutlak untuk pengujian
- βn = Koefisien regresi masing-masing variabel
- Sβn = Standar error masing-masing variabel

Selain kriteria tersebut untuk melihat ada tidaknya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan melihat tingkat signifikansi dengan nilai α = 0,05. Apabila tingkat signifikan < 0,05 dan koefisien βn positif berarti H₁, H₂, H₃ diterima, sebaliknya

apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ berarti H_1, H_2, H_3 ditolak. Jika signifikansi $< 0,05$ tetapi koefisien β_n negatif berarti H_1, H_2, H_3 ditolak

Definisi Operasional

1. Penerapan Good Governance

Good Governance adalah suatu tatanan pemerintahan yang baik, dimana pemerintah tersebut bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan dapat mengelola keuangannya dengan baik.

2. Pengawasan dari DPRD

Pengawasan yaitu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif untuk turut mengawasi kinerja pemerintah. Pengawasan dari DPRD sangat penting untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Pengawasan dari DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak awal perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja.

3. Pengendalian Intern

Pengendalian Internal yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjadi kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

4. Peran Auditor Internal

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi.

jumlah kuisisioner yang dapat diolah adalah 46 kuisisioner. dari 50 responden di Kota Solok yang disebar kuisisioner, hanya 92 % diantaranya yang mengembalikan dan mengisi kuisisioner dengan lengkap. Kuisisioner diantar langsung kepada masing-masing responden dan dijemput langsung dalam rentang waktu penelitian selama 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 29 Juni 2012.

Demografi Responden

Dari hasil penelitian dapat diketahui karakteristik responden pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok yang dijadikan sampel penelitian. Dibawah ini dipaparkan karakteristik responden secara umum berdasarkan umur, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan.

1. Jumlah Responden Berdasarkan Umur

Proporsi pengelompokan responden berdasarkan Umur didominasi oleh pegawai yang masih produktif. Terlihat dari kuisisioner diisi oleh 9 orang responden atau 19,57 % dengan umur 20-30 tahun, 18 orang responden atau 39,13 % dengan umur 31-40 tahun, 11 orang responden atau 23,91 % dengan umur 41-50 tahun, dan hanya 8 orang responden atau 17,39 % dengan umur >51 tahun.

2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Proporsi pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki. Dilihat dari kuisisioner diisi oleh 24 orang responden laki-laki atau 52,17% dan sisanya 22 kuisisioner atau 47,83% diisi oleh responden perempuan.

3. Jumlah Responden Berdasarkan jenjang pendidikan.

5 responden atau 10,87 % mempunyai pendidikan terakhir SMA, 1 responden atau 2,17% mempunyai pendidikan terakhir D1, 1 responden atau 2,17% mempunyai pendidikan terakhir D3, 33 responden atau 71,74 % mempunyai

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 25 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok yang terdiri dari 50 responden. Dari 50 responden tersebut, jumlah responden yang mengembalikan kuisisioner adalah 46 responden mengisi dengan lengkap. Jadi

pendidikan terakhir S1, 6 responden atau 13,05% mempunyai pendidikan terakhir S2.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji sampel dilakukan pada 25 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok dengan jumlah responden sebanyak 46 orang yang terdiri dari kepala dinas dan kepala bagian keuangan dari setiap SKPD. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuisioner, digunakan *corrected item-total correlation*. Jika r hitung $>$ r tabel, maka data dikatakan valid, r tabel untuk $n = 46$ adalah 0,2455.

Pada tabel 14 terlihat bahwa nilai *corrected item-total correlation* terkecil untuk variabel $Y = 0,256$. Untuk variabel $X1 = 0,339$. Untuk variabel $X2 = 0,487$. Untuk variabel $X3 = 0,495$. Dari hasil pengolahan data didapat nilai *corrected item-total correlation* untuk masing-masing variabel Y , $X1$, $X2$, dan $X3$ adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrument, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Nilai reliabilitasnya dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrument yang dikatakan valid lebih besar dari 0,6 menurut Nunnally (1967) dalam Ghozali (2007:42).

Dari nilai *cronbach's alpha* yang terdapat pada tabel 15 diatas, yaitu untuk instrument penelitian variabel $Y = 0,822$, untuk variabel $X1 = 0,815$, untuk variabel $X2 = 0,900$ dan untuk variabel $X3 = 0,832$. Dengan demikian semua instrumen dapat dikatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak.

Pengujian normalitas dalam data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one-sample kolmogorov-smirnov test*, yang mana jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $>$ 0,05 maka distribusi dikatakan normal.

Dari tabel 16 terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,566 maka distribusi dapat dikatakan normal karena berada $>$ 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan $VIF < 10$ maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil perhitungan nilai VIF untuk pengujian multikolinearitas antara sesama variabel bebas

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel di atas menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini

apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel 18, dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel Absut. Tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Data

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Dari tampilan *output* SPSS *model summary* pada Tabel 19, besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,558. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel pengawasan DPRD, pengendalian internal dan peran auditor internal adalah sebesar 55,80% terhadap *good governance*, sedangkan 44,20% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

2. Model Regresi Berganda

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model ini digunakan terdiri dari tiga variabel bebas yaitu pengawasan DPRD (X1), pengendalian internal (X2), peran auditor internal (X3) dan satu variabel terikat yaitu *good governance* (Y). Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 20 berikut:

Berdasarkan Tabel 20 dapat dianalisis model regresi sebagai berikut:
$$Y = 10,680 + 0,646 X_1 + 0,379 X_2 - 0,176 X_3 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 10,680 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu pengawasan DPRD, pengendalian internal dan peran auditor internal adalah nol maka pelaksanaan *good governance* adalah sebesar konstanta 10,680.
- b. Koefisien pengendalian internal sebesar 0,646 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengawasan DPRD satu satuan akan mengakibatkan peningkatan *good governance* sebesar 0,646 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Koefisien pengendalian internal sebesar 0,379 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pengendalian internal, maka akan mengakibatkan peningkatan *good governance* sebesar 0,379 dengan asumsi variabel lain konstan.
- d. Koefisien peran auditor internal sebesar - 0,176 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan peran auditor internal, maka akan mengakibatkan penurunan sebesar 0,176 dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Uji F (*F-Test*)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Berdasarkan Tabel 21 nilai $\text{sig} 0,000$ menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi variabel dependen, berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Dari hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa F_{hitung} yaitu 19,943 dengan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (pengawasan DPRD, pengendalian internal dan peran auditor internal) secara bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (*good governance*).

4. Uji Hipotesis (t-test)

Uji t statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n-k-1 = 46 - 3 - 1 = 42$ adalah 1,6819. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 20, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini :

1. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada α 0,05 adalah 1,6819. Untuk variabel pengawasan DPRD (X_1) nilai t_{hitung} adalah 4,749 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,749 > 1,6819$ atau nilai signifikansi $0,000 < \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,548. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan DPRD (X_1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap *good governance*, sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini diterima.

2. Pengujian Hipotesis 2

Untuk variabel pengendalian internal (X_2) nilai t_{hitung} adalah 3,144 dan nilai sig adalah 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,144 > 1,6819$ atau nilai signifikansi $0,003 < \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,448. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa pengendalian internal (X_2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap *good governance*, sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini diterima.

3. Pengujian Hipotesis 3

Untuk peran auditor internal (X_3) variabel nilai t_{hitung} adalah - 0,684 dan nilai sig adalah 0,498. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu - 0,684 $< 1,6819$ atau nilai signifikansi $0,498 > \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai negatif yaitu - 0,103. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa peran auditor internal (X_3) tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *good governance*, sehingga hipotesis ketiga dari penelitian ini ditolak.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengawasan DPRD Terhadap *Good Governance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan DPRD berpengaruh terhadap *good governance*. Semakin baik pengawasan DPRD, semakin baik pula *good governance*. Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2004) yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Salah satu fungsi pokok DPRD di Indonesia adalah melakukan pengawasan. Tanpa adanya pengawasan DPRD maka *good governance* tidak akan terwujud, karena anggaran rawan terjadi penyelewengan-penyelewengan, sehingga pengelolaan keuangan daerah tidak akan berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anita (2010) mengadakan penelitian tentang pengaruh pengawasan dari DPRD terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengawasan dari DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance*.

Dilihat distribusi frekuensi pengawasan DPRD diatas, item pernyataan nomor 2 dan 3 dengan tingkat capaian responden tertinggi yaitu sama-sama 87,83% yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum anggaran (KUA) tahun anggaran berikutnya kepada DPRD sebagai

landasan penyusunan rancangan APBD dan Pemerintah daerah bersama DPRD membahas KUA yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahulu RAPBD. Item pernyataan nomor 4 dan 9 dengan tingkat capaian responden terendah sama-sama 81,30% yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah tepat waktu dalam mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD dan Pemerintah daerah memberikan laporan tahunan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran kepada DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhir tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk menilai kualitas pengawasan DPRD dikategorikan baik. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dari 25 SKPD di Kota Solok atau 46 responden yang diteliti, terlihat bahwa pengawasan DPRD dengan rerata 84,78%. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai pengawasan DPRD yang dilakukan SKPD dengan kategori baik.

2. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap *Good Governance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap *good governance*. Semakin baik pengendalian internal, maka semakin baik pula *good governance*. Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:17) *Governance* diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program* (UNDP) memberikan pengertian *good governance* sebagai berikut “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Wahyudi (2009) tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*

Dilihat dari distribusi frekuensi pengendalian internal diatas, item pernyataan nomor 1 dengan tingkat capaian responden tertinggi yaitu 89,57% yang menunjukkan bahwa Pemerintah daerah memiliki Integritas dan nilai-nilai etika. Item pernyataan nomor 8 dengan tingkat capaian responden terendah 76,96% yang menunjukkan bahwa Pemisahan kewajiban telah diterapkan secara memadai. Untuk menilai kualitas pengendalian internal dikategorikan cukup baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dari 25 SKPD di Kota Solok atau 46 responden yang diteliti, terlihat bahwa pengendalian internal dengan rerata 82,27%. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai pengendalian internal dikategorikan baik.

3. Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap *Good Governance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap *good governance*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dari penelitian Wahyudi (2009) bahwa peran auditor internal berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *good governance* pada instansi pemerintah Kota Padang. Tetapi menurut Mardiasmo (2004:216) menjelaskan bahwa terdapat kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan permasalahan lainnya belum adanya Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan yang baku, dengan kata lain peranan auditor masih menjadi perdebatan.

Dilihat dari tabel distribusi frekuensi peran auditor internal diatas, item

pernyataan nomor 1 dengan tingkat capaian responden tertinggi yaitu 88,26% yang menunjukkan bahwa auditor internal melakukan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Item pernyataan nomor 6 dengan tingkat capaian responden terendah 78,70% yang menunjukkan bahwa auditor internal melakukan penilaian atas manfaat keberhasilan pelaksanaan suatu program. Untuk menilai kualitas peran auditor internal dikategorikan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dari 25 SKPD di Kota Solok atau 46 responden yang diteliti, terlihat bahwa peran auditor internal dengan rerata 83,77 %. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai peran auditor internal dikategorikan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengaruh pengawasan DPRD, pengendalian intern, dan peran auditor internal terhadap *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap *good governance*.
2. Pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap *good governance*.
3. Peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *good governance*.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah selesai dilaksanakan tetapi penelitian ini memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Seharusnya variabel DPRD respondenya adalah anggota DPRD.
2. Penelitian ini dilakukan hanya di lingkungan pemerintah daerah Kota Solok, sehingga belum terlihat secara menyeluruh aspek pelaksanaan *good governance* secara luas.

3. Pada variabel Peran Auditor Internal tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan permasalahan lainnya belum adanya Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan yang baku.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Untuk pemerintah daerah Kota Solok bersama-sama dengan seluruh perangkat SKPD untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Untuk akademis, dikarenakan adanya variabel lain yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance*, maka hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan atau mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain, seperti : pemeriksaan eksternal, dan pengawasan masyarakat. Sehingga hasil yang diteliti lebih beragam dan akurat.
3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya sampel penelitian di perluas menjadi seluruh kabupaten dan kota se Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- A.Arens, Alvin. dkk. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta : Erlangga.
- Arikunto, Suharismi. 2002. *Prosedur Penelitian. Edisi Revisi V*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- B. Sawyer, Lawrence. dkk. 2005. *Audit Internal Sawyer*. Edisi V. Jakarta : Salemba Empat

- Devfi, Agustina. 2008. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance*. Skripsi. Padang.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Husen, Umar. 2008. *Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- <http://www.padangmedia.com> diakses tanggal 29 Desember 2012 Jam 11.39 Wib
- Krismiaji. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: YKPN.
- PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP Nomor.79 Tahun 2005 Tentang Inspektorat daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007 Tentang Peran Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Rozalina, Anita. 2010. *Pengaruh Pengawasan dari DPRD, Pengendalian Intern, dan Pemeriksaan Ekstern Terhadap Pelaksanaan Good Governance*. Skripsi. UNP. Padang.
- Victor M, Situmorang dan Juhir, Jusuf. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wahyudi, Kurnia. 2009. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Peran Auditor dan Pengawasan Dari Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Good Governance*. Skripsi. UNP. Padang.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yudhoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah, Desentralisasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

LAMPIRAN

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.20291970
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.115
	Kolmogorov-Smirnov Z	.787
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.566

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengawasan DPRD (X1)	.738	1.355
	Pengendalian Internal (X2)	.484	2.065
	Peran Auditor Internal (X3)	.431	2.322

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.863	4.126		.452	.654
	Pengawasan DPRD (X1)	.039	.091	.074	.429	.670
	Pengendalian Internal (X2)	.120	.081	.316	1.489	.144
	Peran Auditor Internal (X3)	-.331	.172	-.432	-1.919	.062

a. Dependent Variable: ABSUT

Analisis Data

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

**Adjusted R Square
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.767 ^a	.588	.558	3.315

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: *Good Governance*

2. Model Regresi Berganda

**Koefisien Regresi Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.680	6.174		1.730	.091
	Pengawasan DPRD (X1)	.646	.136	.548	4.749	.000
	Pengendalian Internal (X2)	.379	.121	.448	3.144	.003
	Peran Auditor Internal (X3)	-.176	.258	-.103	-.684	.498

a. Dependent Variable: *Good Governance*

3. Uji F (F-Test)

**Uji F Hitung
ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	657.598	3	219.199	19.943	.000 ^a
	Residual	461.641	42	10.991		
	Total	1119.239	45			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: *Good Governance*